

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Para ekonom moderen telah mulai membahas masalah kemiskinan dalam konsep yang lebih luas. Kemiskinan, disadari tidak hanya berupa masalah ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memiliki sumber pendapatan, sehingga dengannya, ia dapat atau tidak dapat membeli barang dan jasa, namun juga mencakup pada aspek-aspek *social-deprivation*, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, politik, akses terhadap sumber daya, dan hak-hak asasi lainnya.¹

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Terdapat dua poros strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam pembengkakan kemiskinan. Pertama, kebijakan tidak langsung dengan jalan membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan melalui jalur politik. Kedua, kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan, di mana pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak dapat diserahkan kepada pasar sehingga diperlukan intervensi pemerintah.²

¹ “New Thinking on Poverty: Implications for Globalisation and Poverty Reduction Strategies,” *UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Working Papers* 65 (2008), <https://doi.org/10.18356/fe71a2ba-en>.

² Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>.

Mubyarto³ mengatakan inti dari definisi kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang tidak dapat dihindari oleh si miskin. Menurut Kuncoro⁴, pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang terlampau rendah, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga, semua faktor tersebut merupakan *vicious circle* (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (PN).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius pemerintah. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (kecuali tahun 2008), mulai tahun 2011 – 2014 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III dan IV dan mulai tahun 2015 hingga saat publikasi ini disusun menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran.⁵

³ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 89.

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), 132.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, Tahun 2013-2018*, n.d.

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu data kemiskinan yang menyeluruh. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi sejak tahun 2007. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu rilis dilaksanakan setiap bulan Juli untuk keadaan Maret dan bulan Januari untuk keadaan September. Untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Barat menyusun laporan eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan eksekutif BPS kemiskinan keadaan Maret 2019, disajikan dalam bentuk publikasi “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2019”.⁶

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 3.615,79 ribu jiwa atau 7,45 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat. Selama kurun waktu 2016-2017, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya yaitu dari 4.375.200 orang pada tahun 2013 menurun menjadi 4.168.440 orang pada tahun 2017. Selama periode pengamatan, hingga tahun 2019, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 3.399.160 jiwa.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengambil empat daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kota Bekasi. Pemilihan empat kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kota Bekasi, dalam penelitian ini didasarkan pada keragaman karakteristik ekonomi dan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Kabupaten Sumedang, misalnya, menghadapi kendala infrastruktur yang menghambat kegiatan ekonomi, sehingga menarik untuk dianalisis bagaimana kurangnya infrastruktur mempengaruhi pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan.

Di Kabupaten Garut, kegiatan ekonominya sebagian besar terjadi di luar wilayah, mencerminkan ketergantungan pada faktor eksternal yang memberikan

⁶ Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Propinsi Jawa Barat, Maret 2019*, n.d.

perspektif tentang dampak ekonomi lintas wilayah terhadap pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Kabupaten Kuningan, yang tidak memiliki akses jalan tol, memberikan gambaran tentang bagaimana keterbatasan aksesibilitas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kota Bekasi, sebagai kota industri dan metropolitan, memiliki tingkat industrialisasi yang tinggi, memungkinkan perbandingan antara wilayah urban dan rural dalam hal pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan.

Selain itu, perbedaan indikator ekonomi dan sosial di keempat wilayah ini, seperti pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan, memberikan peluang untuk studi perbandingan yang lebih mendalam. Kota Bekasi yang lebih maju secara ekonomi dapat dibandingkan dengan wilayah yang lebih rural, seperti Kabupaten Garut dan Kuningan, untuk memahami bagaimana faktor-faktor lokal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keempat wilayah ini juga mewakili keseimbangan antara kawasan urban dan rural, memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang ketimpangan ekonomi di Jawa Barat. Pemilihan wilayah dengan infrastruktur yang berbeda, seperti Kabupaten Kuningan yang kurang terhubung dengan jalur tol dibandingkan dengan Kota Bekasi yang memiliki infrastruktur lebih maju, memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Dari segi tingkat kemiskinan, keempat wilayah ini menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin selama periode pengamatan 2015-2019. Di Kabupaten Sumedang, jumlah penduduk miskin berkurang dari 129.030 jiwa pada tahun 2015 menjadi 104.180 jiwa pada tahun 2019. Kabupaten Garut mengalami penurunan dari 296.520 jiwa menjadi 241.310 jiwa pada periode yang sama. Kabupaten Kuningan juga mencatat penurunan, dari 144.070 jiwa pada tahun 2016 menjadi 131.160 jiwa pada tahun 2018. Kota Bekasi, yang merupakan kota dengan perkembangan industri yang pesat, juga mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, yaitu dari 169.200 jiwa pada tahun 2015 menjadi 149.430 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3.615,79 ribu jiwa, atau sekitar 7,45 persen dari total penduduk

Jawa Barat. Penurunan kemiskinan di keempat wilayah ini mencerminkan tren yang konsisten selama periode 2015-2019.

Selain itu, jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Menurut data Susenas Maret 2018, garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 367.755,- per bulan, naik 6,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Garis kemiskinan di Kabupaten Garut tercatat sebagai yang tertinggi di antara wilayah yang diteliti, yaitu sebesar Rp. 241.068,-, sementara Kota Bekasi memiliki garis kemiskinan terendah, yaitu Rp. 582.783,- selama periode pengamatan. Pemilihan keempat wilayah ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan dengan lebih komprehensif dan representatif.

Pemilihan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kota Bekasi dalam penelitian ini juga didasarkan pada variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, yang mencerminkan perbedaan dalam kualitas hidup, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup. Kabupaten Sumedang memiliki IPM yang relatif rendah karena keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menjadikan Sumedang contoh ideal untuk melihat bagaimana infrastruktur yang kurang memadai berdampak pada pembangunan manusia. Di Kabupaten Garut, ketergantungan ekonomi pada wilayah lain turut berpengaruh terhadap investasi lokal di sektor pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya memengaruhi IPM wilayah tersebut. Sementara itu, Kabupaten Kuningan, dengan keterbatasan infrastruktur seperti tidak adanya jalan tol, memiliki akses yang terbatas terhadap layanan dasar yang penting, yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan IPM penduduknya.

Sebaliknya, Kota Bekasi, sebagai kota industri dan metropolitan, memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan ketiga kabupaten lainnya. Infrastruktur yang lebih baik, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta sistem pendidikan yang lebih maju memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan

kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Keempat wilayah ini, dengan perbedaan karakteristik dalam IPM, menawarkan perspektif yang komprehensif untuk memahami bagaimana faktor infrastruktur, kegiatan ekonomi, serta kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pembangunan manusia.

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penting juga untuk melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam analisis di empat kabupaten/kota yang diteliti, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kota Bekasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks ini, semakin besar jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, menandakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak dukungan untuk mencapai kesejahteraan minimum.

Berdasarkan data, Kota Bekasi memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan terendah selama periode pengamatan 2015-2018, yang berarti pengeluaran rata-rata penduduk miskinnya lebih mendekati garis kemiskinan dibandingkan wilayah lain. Sebaliknya, Kabupaten Kuningan tercatat memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi, yang menunjukkan bahwa penduduk miskinnya berada pada jarak yang lebih jauh dari garis kemiskinan, membutuhkan upaya lebih besar dalam kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kondisi mereka.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga penting dalam menilai distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini menggambarkan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin; semakin tinggi indeksnya, semakin besar ketimpangan pengeluaran di kelompok miskin. Di Kota Bekasi, Indeks Keparahan Kemiskinan terendah tercatat pada 0,15, menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin relatif kecil, sementara Kabupaten Kuningan memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi pada 0,59, yang menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran yang signifikan di antara penduduk miskin di wilayah tersebut.

Penentuan apakah seseorang termasuk dalam kategori miskin atau tidak ditentukan dengan membandingkan pengeluaran per bulan dengan garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan

dianggap miskin. Selama periode 2015-2019, garis kemiskinan di Jawa Barat terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya peningkatan biaya hidup dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2018, garis kemiskinan di Jawa Barat sebesar Rp 367.755,- per bulan, meningkat 6,77 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan pengeluaran (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan ketimpangan di antara penduduk miskin (Indeks Keparahan Kemiskinan), khususnya di wilayah dengan indeks tinggi seperti Kabupaten Kuningan.

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan atau melalui redistribusi pendapatan.⁷ Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya.

Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil, bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya

⁷ Nanak Kakwani and Hyun H Son, "Pro-Poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies," n.d., 28.

ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengukur kemajuan perekonomian daerah dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keadaan perekonomian Jawa Barat tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64 persen. Perekonomian Jawa Barat tahun 2017 tumbuh sebesar 5,29 persen. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,66 persen.

Untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, dibutuhkan alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu melalui penyajian angka-angka pendapatan regional. Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.⁸

Badan Pusat Statistik mencatat angka pertumbuhan ekonomi untuk empat kabupaten/kota di Jawa Barat untuk tahun 2015 – 2019. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 sampai 2019, dari data publikasi BPS adalah sebesar 5,2%, 5,7%, 6,2%, dan 5,8 %, dan 6,3%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 sampai 2019, tetapi mengalami penurunan di 2018.

Untuk Kabupaten Garut, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut berada di angka 4,5% untuk tahun 2015, pada tahun 2016 berada di angka 5,3%, pada tahun 2017 berada di angka 4,91%, dan pada 2018, berada di kisaran 4,96%, dan pada tahun 2019 berada di angka 5,0%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2015 ke tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut mengalami kenaikan, kemudian relatif stagnan hingga tahun 2019.

⁸ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 55.

Untuk Kabupaten Kuningan, laju pertumbuhan ekonomi di daerah ini selama tahun 2015-2019, berada di kisaran angka 6%. Yaitu di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%, di tahun 2016, sebesar 6,09%, di tahun 2017 sebesar 6,4%, dan di tahun 2018 sebesar 6,43%, demikian juga pada tahun 2019, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Kuningan tersebut cukup stabil.

Untuk Kota Bekasi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,65, pertumbuhan ekonomi tahun 2016, sebesar 6,09%, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,73%. Adapun pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mencapai angka 5,86%. Dan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mencapai 5,4%. Hal ini menandakan bahwa pada periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi relatif stabil.

Pada hakikatnya pembangunan adalah usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbesar kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Adapun pendapatan perkapita di kabupaten/kota di suatu wilayah, digunakan proxy PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah atau daerah.

Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita. Norton⁹ menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pendapatan per kapita tersebut diperoleh dengan membagi pendapatan regional/produk regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Untuk kondisi di Jawa Barat, khususnya di empat kabupaten/kota di Jawa Barat, pendapatan perkapita mengalami kenaikan, selama periode pengamatan yaitu dari Tahun 2015-2019. Kota Bekasi merupakan daerah yang pendapatan perkapitanya relatif paling besar dibandingkan dengan daerah yang lain selama periode pengamatan.

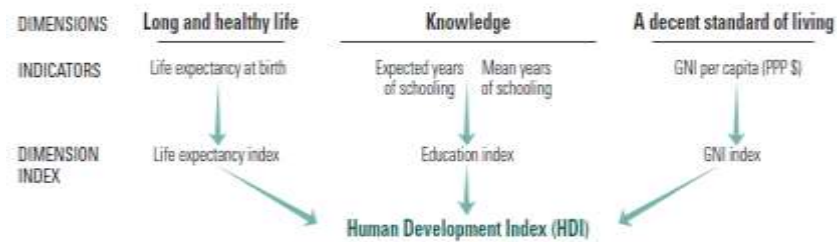
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM atau dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM-nya.

Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi

⁹ Seth W Norton, "Economic Growth and Poverty: In Search of Trickle-Down," *Cato Journal*, n.d., 13.

menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dalam perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.¹⁰ Berikut ini merupakan dimensi yang menggambarkan unsur-unsur penting dalam Indeks Pembangunan Manusia:



Gambar 1. 1 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia, Sumber: (UNDP, 2017)

Amartya Sen mengatakan bahwa *“Human development, as an approach, is concerned with what I take to be the basic development idea: namely, advancing the richness of human life, rather than the richness of the economy in which human beings live, which is only a part of it.”*¹¹

Untuk Propinsi Jawa Barat, keadaan IPM selama sembilan tahun terakhir mengalami peningkatan, khususnya di tahun 2010 sampai 2019, keadaan IPM Jawa Barat mengalami status pembangunan manusia yang tinggi. Untuk kondisi kabupaten/kota yang diteliti, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kota Bekasi, maka Indeks Pembangunan Manusia di empat kabupaten/kota di Jawa Barat tersebut, pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019, mengalami kondisi status pembangunan manusia yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa pembangunan manusia di kabupaten/kota tersebut telah berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan hasil data dan pemaparan masalah tersebut di atas, dapat kita ketahui perkembangan Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam disertasi dengan judul: **Pendapatan Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat.**

¹⁰ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 117.

¹¹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford University Press, 1999), 151.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat masalah dalam penelitian disertasi ini yaitu, pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat. Sebagai contoh, dalam pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Sementara itu, kebijakan pemerintah juga cenderung berpihak kepada elit ekonomi, sehingga pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap kepada kelompok tertentu. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep *trickledown effect*, namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengangkat kemampuan ekonomi rakyat miskin, sehingga ketimpangan ekonomi semakin tajam dan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan yang sampai saat ini masih dirasakan.

Hidup layak merupakan hak azasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa salah satu tugas pokok pemerintah Republik Indonesia ialah "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini berarti, hidup terbebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak azasi setiap warga negara, dan adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu.

Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional.

Berdasarkan hal tersebut, diduga faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin ialah Pendapatan Per-Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Dari uraian di atas maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana variabel Pendapatan Per Kapita di kabupaten/kota Sumedang, Garut, Kuningan dan Bekasi berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di empat kabupaten/kota tersebut di Jawa Barat?
2. Bagaimana variabel Pertumbuhan Ekonomi di empat kabupaten/kota berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di empat kabupaten /kota di Jawa Barat tersebut?
3. Bagaimana variabel Indeks Pembangunan Manusia di empat kabupaten/kota berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di empat kabupaten /kota tersebut di Jawa Barat tersebut?
4. Bagaimana variabel Pendapatan Per-Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di empat kabupaten/kota di Jawa Barat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh variabel Pendapatan Per Kapita terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Sumedang, Garut, Kuningan dan Bekasi Jawa Barat.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di empat kabupaten/kota di Jawa Barat tersebut.
3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di empat kabupaten/kota di Jawa Barat tersebut.
4. Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di empat kabupaten/kota di Jawa Barat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, terutama dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan yang disusun berdasarkan perspektif ekonomi politik Islam. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua ranah manfaat yaitu:

1. Secara Akademis

- 1) Memberikan khasanah yang baru terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam.
- 2) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan teoritis keilmuan bidang ekonomi terutama ekonomi syariah, yang berkaitan dengan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan.
- 3) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur review (hasil penelitian relevan) untuk penelitian-penelitian disertasi yang akan datang, yang akan memiliki tema dan kajian yang sama.
- 4) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai judul atau permasalahan penelitian lanjutan oleh para akademisi dan praktisi baik melalui jurnal penelitian maupun disertasi penelitian.

2. Manfaat secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merumuskan sejumlah kebijakan mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, yang akan melakukan kajian dan penelitian dengan judul dan topik yang sama.

E. Kerangka Berfikir

Suatu studi yang bersifat khusus tentang kemiskinan mengemukakan bahwa karakteristik utama penyebab kemiskinan pada wilayah miskin mencakup: (1) sumber daya alam; (2) teknologi dan unsur pendukungnya; (3) sumber daya manusia; serta (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan.¹²

Menurut Yustika, dalam konteks ekonomi politik kemiskinan di Indonesia, terdapat empat klausul yang berpotensi menjadi penyebab atas kesulitan upaya mengurangi kemiskinan. Empat klausul tersebut *Pertama*, kekuatan kelompok bisnis dan sektor marjinal (petani, nelayan, buruh, sektor informal, dan lain-lain) yang berat sebelah, sehingga energi untuk mempengaruhi kebijakan menjadi timpang. Sebagai contoh, para sekumpulan pengusaha mendesak pemerintah untuk mengambil Utang Luar Negeri (ULN) baru sebagai instrumen untuk menambal defisit anggaran (dan bukan dengan jalan menaikkan pajak usaha). Padahal seperti dimengerti bersama, pembayaran ULN selalu diambilkan dari pengurangan jatah subsidi masyarakat.¹³ Jika suara ini yang diserap, maka nantinya kelompok miskin yang akan banyak memikul beban pembayarannya.

Kedua, ketidakseimbangan laju perkembangan antar sektor ekonomi akibat preferensi strategi pembangunan ekonomi yang tidak akurat. Kebijakan yang mendorong pembangunan sektor industri atau jasa tanpa melibatkan sektor pertanian di masa lalu, telah menciptakan kantong-kantong (*enclaves*) kemiskinan yang tidak sedikit. Celakanya, sektor padat modal yang telah diinvestasikan oleh pemerintah tidak kunjung menampakkan hasilnya, padahal sudah sangat banyak biaya yang disuntikkan. Di luar itu, sektor industri yang dikembangkan ternyata struktur pasarnya sangat terkonsentrasi, akibatnya muncul kebijakan semacam monopoli, kartel, tata niaga, dan lain-lain.¹⁴

Ketiga, ketimpangan pembangunan antar sektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan. Dukungan kebijakan terhadap pembangunan sektor industri

¹² Budihardjo, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hermeneia : Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 2 (n.d.): 30.

¹³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis Dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 22.

¹⁴ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 78.

tanpa menyertakan sektor pertanian di masa lampau telah menciptakan banyak orang-orang miskin. Akibat dari kebijakan yang salah tersebut menyebabkan ketimpangan sektoral yang akut, dimana sektor pertanian yang hanya menyumbangkan 13% terhadap PDB dihuni sekitar 40% tenaga kerja. Sebaliknya, sektor industri yang mendominasi PDB dalam jumlah cukup besar, namun sangat hemat tenaga kerja.

Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Menurut Khurshid Ahmad, ada empat dasar filosofi pembangunan dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat¹⁵ yaitu:

- a) *Tauhid*, yang memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah, baik yang menyangkut hubungan antara Allah dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya;
- b) *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Konsep ini merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber daya supaya berguna dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan;
- c) *Khilafah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, maupun bidang lainnya; dan
- d) *Tazkiyyah*, di mana misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat, dan negara. Jalan *tazkiyyah* dalam pembangunan ekonomi

¹⁵ Khurshid Ahmad, *International Conference on Islamic Economics, Eds. Studies in Islamic Economics: A Selection of Papers, Presented to the 1. International Conference on Islamic Economics Held at Makkah* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1981), 81.

juga mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat.

1. Produk Domestik Regional Bruto

Pendapatan Regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun dan memasukkan nilai inflasi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya dan tidak memasukkan nilai inflasi.

Ada beberapa cara lain yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah yakni: 1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*) adalah jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah atau region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi; 2) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau region dalam jangka waktu tertentu, biasanya

satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya; 3) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*) adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah atau region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

2. Pendapatan Perkapita

Tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian antara lain pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Salah satu terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam sebuah perekonomian. Pertama, besarnya output nasional merupakan gambaran awal seberapa efisien sumber-sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Maka semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya; besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara.

Dimana alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output perkapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Jika angka output pendapatan semakin besar, maka tingkat kemakmuran dianggap semakin tinggi; besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya.

a. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk Domestik Bruto Per Kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor–sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti sektor jasa yang padat modal.¹⁶ Sedangkan pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut.

¹⁶ Hermanto Siregar, “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin,” n.d., 18.

b. Manfaat Perhitungan Pendapatan Perkapita

Manfaat perhitungan pendapatan perkapita adalah sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. Pendapatan per-kapita dihitung secara berkala, biasanya satu tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain sebagai berikut.

- a) Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
- b) Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain.
- c) Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya.
- d) Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil lahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20. Para ekonom klasik tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo dan W.A Lewis. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik yang pertama kali membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Smith pada tahun 1723-1790 yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya *An inquiry into the Nature and Causes of The wealth of Nation* tahun 1776. Inti ajaran Adam Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan

ekonomi sampai terjadi posisi stationer (*stationare state*). Posisi stationer terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya termanfaatkan.¹⁷

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristik umum teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Kelompok ini cenderung tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah.

Menurut Kuznets, dalam Gamal Abdul Aziz¹⁸, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan tiga hal pokok, antara lain: 1. laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil). 2. persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya. 3. pola persebaran penduduk.

Menurut Todaro¹⁹, sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan.

¹⁷ Tafeta Febryani, "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di 4 Negara ASEAN," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.20473/jjet.v2i1.5501>.

¹⁸ Gamal Abdul Aziz and Eny Rochaida, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara," 2016.

¹⁹ Michael Todaro and Boerhan Aris Moenandar, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Erlangga, 1994).

b. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1) Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

2) Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4) Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan di antaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5) Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

c. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat regional atau yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun dan memasukkan nilai inflasi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya dan tidak memasukkan nilai inflasi.

Ada beberapa cara lain yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah yakni: 1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*) adalah jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi; 2) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu

tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya; 3) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*) adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah atau region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

Produk Domestik Bruto dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk Domestik Bruto per Kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat.²⁰

4. Indeks Pembangunan Manusia

Dasar dari ide pembangunan adalah untuk memajukan kekayaan kehidupan manusia, daripada kekayaan ekonomi di mana manusia hidup, yang hanya sebagian darinya. Ide inilah yang menyebabkan manusia menjadi objek dalam pembangunan tersebut. Selanjutnya, Amartya Sen menjelaskan bahwa manusia mempunyai sebuah hak dasar yang harus dipenuhi, hak tersebut berupa kebebasan akses untuk memperoleh kehidupan layak, ekonomi, kesehatan dan berbagai peluang lainnya.

²⁰ Tarigan, *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi*, 33.

Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk memberikan akses yang mudah terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia tersebut.

Komponen dasar dalam paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat macam, yaitu keadilan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), produktivitas (*productivity*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dalam hal ini keadilan yang dimaksud adalah terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap individu manusia untuk memperoleh setiap hak dasar mereka. Kesetaraan manusia dalam memperoleh hak-hak tersebut dianggap sebagai hak asasi manusia dasar dalam paradigma pembangunan manusia.

Yang kedua, keberlangsungan pembangunan manusia harus terus *sustainable*. Maksudnya, generasi berikutnya harus mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan yang sama dengan yang kita nikmati saat ini. Sehingga perencanaan pembangunan manusia harus berkelanjutan, berorientasi pada masa depan.

Yang ketiga, pembangunan manusia akan selalu membutuhkan investasi dari manusia itu sendiri dan lingkungan ekonomi makro yang memungkinkan bagi mereka untuk mencapai potensi yang maksimal. Setiap pembangunan harus dilakukan secara efisien karena sumberdaya yang tersedia pada sektor tertentu jumlahnya sangat terbatas. Inilah salah satu tantangan dalam melakukan pembangunan manusia.

Komponen terakhir adalah pemberdayaan. Dalam hal ini, setiap pembangunan manusia tidak bersifat *paternalistic*, sehingga dalam prakteknya setiap orang memiliki kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya membentuk kehidupan mereka sendiri.

Model pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat hal tersebut diatas. Terdapat beberapa alternatif tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan sosial, politik sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan derajat pribadi dan jasmani hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari model tersebut.

Konsep pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik,

mental, maupun secara spiritual. Ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang diharapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang dapat turut berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan pembangunan manusia, baik dalam konteks nasional maupun regional. Hal ini dianggap penting karena kebijakan sebuah pembangunan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan berdampak pada proses pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengurangi disparitas antar daerah yang merupakan persoalan sulit bagi kebanyakan negara berkembang terutama negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi.²¹

Indeks Pembangunan Manusia ditujukan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, maka digunakanlah suatu indikator untuk mengetahui dampak sebagai komponen dasar penghitungan, yaitu angka harapan hidup ketika lahir. Pencapaian pendidikan dapat diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara maupun daerah menunjukkan sejauh mana suatu negara atau daerah mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu berupa angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang capaian yang harus dicapai untuk mencapai sasaran tersebut.

Pembentukan modal manusia merupakan suatu tahapan untuk mendapatkan dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memiliki keahlian, pendidikan, spesialisasi, dan pengalaman yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya pembentukan modal manusia dikaitkan

²¹ Aloysius Gunadi Brata, "Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia" 7, no. 2 (2002): 11.

dengan investasi pada manusia yang diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang produktif dan kreatif.

Kualitas pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi. Penekanan terhadap pentingnya kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena dengan sumber daya yang unggul akan menghasilkan seluruh tatanan kehidupan yang maju di berbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga kualitas manusia memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengolahan pembangunan wilayahnya.

Untuk mengukur kualitas manusia dapat dilihat dari capaian angka IPM. Angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup layak. Jadi setiap kabupaten/kota yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk. Adapun kategori tersebut sebagai berikut :

Tinggi	: IPM lebih dari 80.0
Menengah Atas	: IPM 66.0-79.9
Menengah Bawah	: IPM antara 50.0-6.9
Rendah	: IPM kurang dari 50.0

Sumber: (BPS-Bappenas-UNDP, 2001)²²

Pada tahun 2015, Indonesia termasuk dalam kategori menengah dalam pembangunan manusia dengan peringkat ke 113 dari 187 negara. Dilihat dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara, IPM Indonesia berada dua peringkat di atas Vietnam namun jauh di bawah Singapura, Brunai, Malaysia, Thailand. Meskipun IPM Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi Indonesia masih berada pada peringkat yang ke lima di tingkat Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena rendahnya perhatian pemerintah pada aspek pembangunan manusia. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia di Asia Tenggara:

²² Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia* (BPS, 2018).

Tabel 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia Asia Tenggara Tahun 2015

No	Negara	IPM	Ranking Dunia
1	Singapura	92.5	5
2	Brunei Darussalam	86.5	30
3	Malaysia	78.9	59
4	Thailand	74	87
5	Indonesia	68.9	113
6	Vietnam	68.3	115
7	Filipina	68.2	116
8	Laos	58.6	133
9	Kamboja	56.3	143
10	Myanmar	55.6	145

Sumber: UNDP, 2015²³

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 2
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen
Kapabilitas Dasar Manusia, Tahun 2010 - 2017

Komponen	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup	69.81	70.01	70.20	70.40	70.59	70.78	70.90	71.06
Harapan Lama Sekolah	11.29	11.44	11.68	12.10	12.39	12.55	12.72	12.85
Rata-rata Lama Sekolah	7.46	7.52	7.59	7.61	7.73	7.84	7.95	8.10
Pengeluaran per Kapita	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664
IPM	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81
Pertumbuhan IPM	-	0.84	0.90	0.91	0.87	0.93	0.91	0.90

Sumber: BPS, 2018²⁴

²³ *What Is Human Development? Human Development Reports, 2020*, <http://hdr.undp.org/en/content/what-human-development>.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia, 2018*.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, Indonesia telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,25 tahun atau tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Indonesia hanya sebesar 69,81 tahun, dan pada tahun 2017 telah mencapai 71,06 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1,56 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah bertambah 0,64 tahun.

Selama periode 2010 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,87 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di Indonesia telah mencapai 12,85 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,18 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2017. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 2017, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 8,10 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp10,66 juta per tahun. Selama tujuh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar 1,76 persen per tahun.

Sumber daya manusia sangat berperan dalam meningkatkan suatu pembangunan di setiap negara, Oleh karena itu peran pemerintah harus memperhatikan dalam memicu kemajuan dalam pembangunan negara. Islam memandang bahwa manusia memiliki dua tugas yang utama di antaranya sebagai

abdullah (hamba Allah) dan *Khalifatullahu fil ard* yaitu wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkannya.²⁵

Bagi Islam, pembangunan yang dilakukan manusia hanya mengejar satu tujuan yang utama, yaitu kesejahteraan umat. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak juga menderita. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam”.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan hambanya berdasarkan rahmat dan kehendak Allah SWT, karena manusia diciptakan untuk menjalankan tugas dunia dan membangun kesejahteraan. Dalam membangun kesejahteraan perlu adanya manusia, manusia berperan penting dalam pembangunan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Adalah sebagai khalifah (pemimpin) dimuka bumi ini, oleh sebab itu maka manusia tidak dapat terlepas oleh tugasnya yaitu sebagai pemimpin.

Ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan manusia adalah Produktifitas (*Productivity*), Pemerataan (*Equity*), Kestinambungan (*Sustainability*), dan Pemberdayaan (*Empowerment*).²⁶

5. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan

²⁵ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 7.

²⁶ Mohammad Bhakti Setiawan and Abdul Hakim, “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia,” *Jurnal Economia* 9 (2013): 9.

kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar.

b. Jenis - Jenis Kemiskinan

Secara konsep, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Sementara kemiskinan relatif, memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lain yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan atau standar hidup.²⁷

²⁷ Hendrik Van den Berg, "Economic Growth and Development," *World Scientific Pub*, 2012, 55.

c. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse²⁸ secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

a) Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

b) Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Bank Dunia membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin. Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis

²⁸ Ragnar Nurkse, "Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries," *The Economic Journal* 63, no. 252 (1953).

kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

Mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria, yaitu: Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

Pendekatan dalam pengukuran kemiskinan dengan strategi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organization (ILO)* pada tahun 1976 dengan judul "Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia". Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Disamping itu kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

c) Penyebab Kemiskinan

Menurut Dowling dan Valenzuela²⁹ masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh rendahnya modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, atau kemampuan

²⁹ J. Malcolm Dowling and Rebecca J. Valenzuela, *Economic Development in Asia* (Singapore: Cengage Learning, 2010).

membangun. Mereka juga memiliki modal fisik dalam jumlah yang sangat kecil. Lebih lanjut, jika mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik, mungkin mereka tidak memiliki kesempatan bekerja karena adanya diskriminasi.

d) Teori Lingkaran Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal Sharp³⁰ pada tahun 1996 mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
- 4) Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori Lingkaran Kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yaitu suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

Indikator kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan dan ekonomi (konsumsi per kapita). Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak maka diperlukan tolok ukur yang jelas. Berbagai pendekatan atau konsep digunakan sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan.

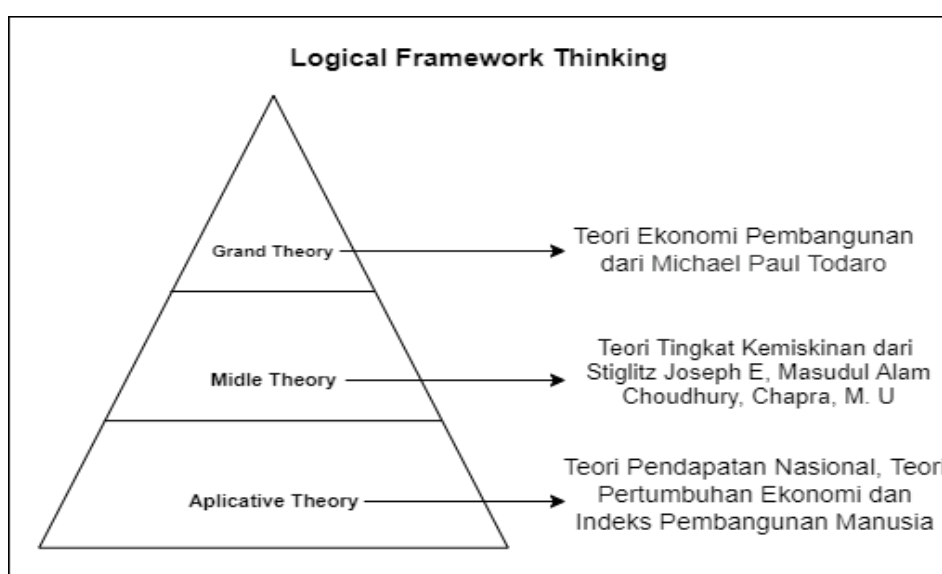
³⁰ Charles A Register, Paul W. Grimes, and Ansel Miree Sharp, *Economics of Social Issues. Twenty-First Edition. Economics of Social Issues* (Dubuque: McGraw-Hill Education, 2015).

Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan. Bila dipetakan ada dua paradigma atau *grand theory* mengenai kemiskinan yaitu paradigma neo-liberal dan demokrasi sosial, yang kemudian menjadi dasar dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program anti kemiskinan. Tabel berikut menunjukkan dua paradigma kemiskinan yang memiliki landasan teoritis, konsep, indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan dan strategi mengatasi kemiskinan yang berbeda. Aspek pembangunan manusia salah satunya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini adalah salah satu tolak pengukuran pembangunan selain menggunakan *Gross Domestic Bruto*. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah di negara itu dapat meningkatkan angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa terkecuali) dan tingkat pengeluaran dan konsumsi agar dapat memenuhi standar hidup layak. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penduduk. Pemerintah memiliki tugas dalam menyediakan sarana publik untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk.

Dalam sudut pandang ekonomi politik terhadap kemiskinan atau ketidaksetaraan maka akan dipengaruhi oleh bagaimana pandangan terhadap hakikat manusia (*human nature*), peran negara, dan fungsi pemerintah. Pandangan-pandangan tersebut selanjutnya dipergunakan untuk menjelaskan penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan sekaligus usulan cara mengatasinya.

Ada dua teori besar (*grand theory*) tentang kemiskinan yaitu paradigma *neo-liberal* dan paradigma demokrasi sosial. Teori *neo-liberal* berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock, dan John Stuart Mill. Menurut pandangan neo-liberal bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang diakibatkan oleh kelemahan atau pilihan individu. Negara dalam hal ini hanya berperan sebagai “penjaga malam” dan strategi yang diterapkan bersifat “residual” yakni melalui kekuatan pasar dan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemberian bantuan kepada orang miskin secara langsung dan selektif.

Bertentangan dengan pandangan ini, demokrasi-sosial yang berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels berpendapat bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan individu. Karenanya persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi semata-mata dianggap tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini karena faktor kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat serta akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber daya kemasyarakatan.



Gambar 1.2 Logical Framework Thinking

1) *Grand Theory* (Teori Ekonomi Pembangunan dari Michael Paul Todaro)

Grand theory di dalam skema ini adalah teori ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Michael Paul Todaro. Todaro berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya tentang peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup aspek distribusi pendapatan, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Todaro menekankan pentingnya pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi³¹. Dalam bukunya, Todaro menyebutkan bahwa "pembangunan ekonomi

³¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development* (Boston: Addison-Wesley, 2015), h. 14-15.

yang berhasil harus ditandai dengan pengurangan ketidaksetaraan dan peningkatan standar hidup bagi seluruh lapisan masyarakat³².

2) *Middle Theory* (Teori Tingkat Kemiskinan dari Stiglitz Joseph E., Masudul Alam Choudhury, dan M. U. Chapra

Middle-range theory mencakup teori-teori yang lebih spesifik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Joseph E. Stiglitz menyoroti bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dan kebijakan publik yang tidak adil dapat memperburuk kemiskinan. Dalam bukunya "*The Price of Inequality*", Stiglitz menguraikan bagaimana distribusi kekayaan yang tidak merata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperdalam kemiskinan³³.

Masudul Alam Choudhury menggabungkan perspektif ekonomi dan etika dalam pendekatannya terhadap kemiskinan. Choudhury menekankan pentingnya etika dan moral dalam pengelolaan ekonomi, serta perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial³⁴.

M. U. Chapra juga mengambil pendekatan serupa, dengan menekankan peran nilai-nilai moral dan etika dalam mengatasi kemiskinan. Chapra berpendapat bahwa ekonomi yang beretika dapat menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan peningkatan kesejahteraan sosial³⁵.

3) *Applied Theory* (Teori Pendapatan Nasional, Teori Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia)

Applied theory berfokus pada aplikasi praktis dari teori-teori untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Teori Pendapatan Nasional: Teori ini menjelaskan cara mengukur total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu. Pendapatan nasional digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dan

³² Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 32

³³ Joseph E. Stiglitz, *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future* (New York: W.W. Norton & Company, 2012), h. 48-49.

³⁴ Masudul Alam Choudhury, *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry* (Emerald Group Publishing, 2011), h. 112-113.

³⁵ M. U. Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Islamic Foundation, 1992), h. 87-88.

merumuskan kebijakan ekonomi. Misalnya, kebijakan fiskal dan moneter dapat dirancang untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi kemiskinan³⁶.

Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, inovasi, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan³⁷. Menurut teori ini, "pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan"³⁸.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks ini digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan manusia dan merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat berdampak positif pada IPM dan mengurangi kemiskinan³⁹.

F. Hipotesis

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan telah banyak dilakukan di Indonesia. Hasil studi terbaru menemukan bahwa:

- a) Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang. Namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat.
- b) Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode sebelum krisis, banyak masyarakat yang tetap rentan terhadap kemiskinan.
- c) Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan.

³⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics* (New York: McGraw-Hill, 2009), h. 75-76

³⁷ Robert J. Barro, *Economic Growth* (New York: McGraw-Hill, 1995), hlm. 15-16.

³⁸ Robert J. Barro, 23.

³⁹ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2019* (New York: UNDP, 2019), hlm. 45-46.

- d) Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan.
- e) Memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni *efek trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah atau pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.⁴⁰

2. Hubungan PDRB Per Kapita terhadap Kemiskinan

Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Perhitungan atas dasar berlaku (*at current Price*) merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku belum menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat didalamnya. Pendapatan perkapita merupakan

⁴⁰ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Pendapatan perkapita sering menjadi tolak ukur kemakmuran suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara.

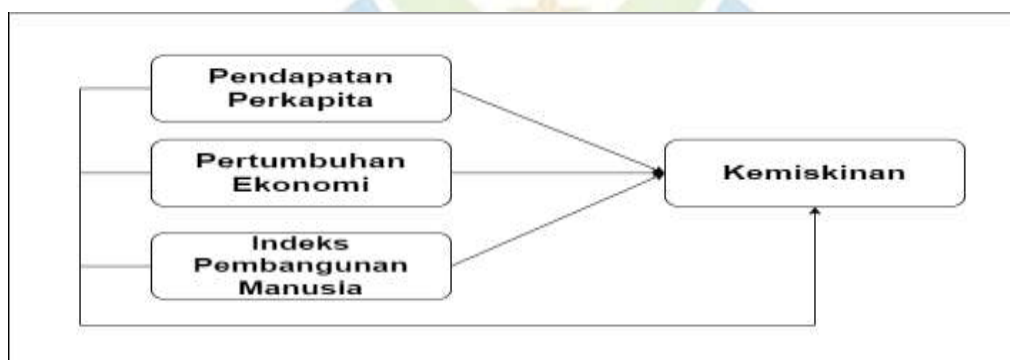
Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Perhitungan atas dasar berlaku (*at current Price*) merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku belum menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat didalamnya. Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Pendapatan perkapita sering menjadi tolak ukur kemakmuran suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara.

3. Hubungan IPM terhadap Kemiskinan

Salah satu strategi atau upaya pengentasan kemiskinan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia. Todaro (2006) menyatakan bahwa IPM menggambarkan

indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Rendahnya IPM akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia.

Dari uraian mengenai hubungan antar variabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan IPM terhadap kemiskinan di empat kabupaten/kota di Jawa Barat. Peneliti memberanikan diri untuk menuangkan hubungan beberapa variabel di atas, dengan menggunakan paradigma penelitian, yang dituangkan dalam bagan berikut.



Sumber : Penulis, 2020

Gambar 1. 3 Hipotesis Penelitian

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Diantara penelitian tersebut ada yang berbentuk buku dan berbentuk jurnal baik skala nasional maupun internasional. Dalam hal ini penulis akan mengkaji beberapa tulisan yang terdapat dalam jurnal baik nasional dan internasional berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan :

1. Denni Sulistio Mirza, 2011. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah*. Jurnal *JEJAK*, Volume 4, Nomor 2, September 2011.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah. Hasil analisis regresi panel data untuk periode 2006-2009 menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada IPM; penurunan kemiskinan sebesar 1% dapat meningkatkan IPM sebesar 0,208. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan pada IPM; peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dapat meningkatkan IPM sebesar 0,153. Belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada IPM; peningkatan belanja modal sebesar 1% dapat meningkatkan IPM sebesar 0,274. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja modal yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan IPM melalui perbaikan dalam pendidikan dan kesehatan. Selama periode studi, belanja modal pemerintah Jawa Tengah rata-rata meningkat sebesar Rp104.826.520.666, yang berhubungan dengan peningkatan IPM.
2. Ni Komang Meriyanti, 2015. *Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014*. Jurnal *PENDIDIKAN EKONOMI Undiksha* Vol: 5 No: 1 Tahun: 2015.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menilai (1) pelaksanaan program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tahun 2011-2014, (2) efektivitas pengentasan kemiskinan di daerah tersebut selama periode yang sama, dan (3) pengaruh program IPM terhadap pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah penelitian kausalitatif dengan sampel sebanyak 84 responden dari 515 populasi, diambil menggunakan teknik formulasi Slavin. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan kuesioner, dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif serta

⁴¹ Denni Sulistio Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah," *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan* 4, no. 2 (2011).

⁴² Ni Komang Meriyanti, Iyus Akhmad Haris, and M Pd Made Artana, "Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 5, no. 1 (2015).

menggunakan korelasi product moment. Hasil analisis menunjukkan bahwa program IPM di Kecamatan Buleleng berada pada kategori sangat baik dengan skor 4,722, menunjukkan bahwa program tersebut perlu dipertahankan. Pengentasan kemiskinan juga berada pada kategori baik dengan skor 4,425, menunjukkan perlunya peningkatan untuk mencapai kategori sangat baik. Program IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dengan nilai thitung sebesar 6,680, p-value 0,000, dan korelasi 0,594, yang berarti IPM memberikan kontribusi sebesar 35,2% dalam pengentasan kemiskinan.

3. Nurul Fadlillah, Sukiman, dan Agustin Susyatna Dewi, 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013*. Jurnal *EKO-REGIONAL*, Vol.11, No.1, Maret 2016.⁴³ Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada 29 kabupaten di Jawa Tengah periode tahun 2009-2013, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun. 2) Apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat, maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat. 3) Apabila indeks pembangunan manusia meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun. 4) Apabila pertumbuhan penduduk meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan meningkat, namun peningkatannya tidak signifikan (pengaruhnya tidak terlalu besar). 5) Variabel pendapatan perkapita memiliki koefisien paling besar, sehingga variabel pendapatan perkapita adalah variabel yang memiliki elastisitas paling besar (yang paling memengaruhi jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tiga variabel lainnya).
4. Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad dan Abubakar Hamzah, 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.. Jurnal PERSPEKTIF EKONOMI*

⁴³ Nurul Fadlillah, Agustin Susyatna Dewi, and Sukiman Sukiman, "Analisis Pengaruh Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran, Ipm Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013," *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 11, no. 1 (2016).

DARUSSALAM Volume 4 Nomor 2, September 2018 ISSN. 2502-6976.⁴⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan data time series selama 20 tahun (1996-2015) dari data sekunder untuk seluruh Provinsi Aceh. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dijelaskan sebesar 76,2% oleh variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan, dengan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien -1,006. Sebaliknya, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien 0,557 dan 2,905.

5. Abdul Rahman dan Muh. Fiqram Alamsyah, 2019. *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar*. Jurnal *EcceS* Volume 6 Nomor 1 Ed. Jun 2019 : page :111-129 p-ISSN: 2407-6635 e-ISSN : 2580-5570.⁴⁵ Penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap konsumsi dan kemiskinan di kota Makassar, khususnya di kalangan masyarakat migran, menggunakan Model Regresi Linier Berganda dan Analisis Jalur (*path*) dengan data primer dari kuesioner yang diolah menggunakan Excel dan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan berdampak negatif terhadap konsumsi, sementara pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap konsumsi. Pendidikan juga tidak berdampak signifikan dan

⁴⁴ Eka Agustina, Mohd Nur Syechalad, and Abubakar Hamzah, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)* (Darussalam Journal of Economic Perspectives) 4, no. 2 (2018): 265–83.

⁴⁵ Abdul Rahman and Muh Fiqram Alamsyah, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar," *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 6, no. 1 (2019): 111–29.

negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Konsumsi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kemiskinan melalui konsumsi. Temuan ini menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan sebagai faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan, serta perlunya kebijakan yang mempertimbangkan pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi dampak migrasi pada daerah asal serta fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat migran perkotaan.

6. Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, 2018. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. *Equilibrium: Jurnal EKONOMI SYARIAH* Volume 6, Nomor 2. Kemiskinan adalah masalah pembangunan penting yang perlu diminimalisir karena dapat menyebabkan berbagai masalah sosial. Dalam pandangan Islam, kemiskinan dianggap membahayakan jiwa dan iman, bahkan mendekati kekufuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran. Menggunakan data sekunder dari BPS untuk periode 2013-2017 dan data panel dari 33 provinsi di Indonesia, serta metode analisis jalur dengan software WarpPLS 5.0, hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan dampak signifikan. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan dapat memediasi pengaruh IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
7. Puji Yuniarti, Wiwin Wianti dan Nandang Estri Nurgaheni, 2020. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* Vol 2 No 3 (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia. Variabel

yang dianalisis meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik yang dianalisis melalui regresi linier berganda, studi ini menemukan bahwa hanya tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan tidak menunjukkan dampak signifikan secara statistik. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih informasional di masa depan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Yu Zhu, Shahid Bashir & Mohamed Marie dengan judul “*Assessing the Relationship between Poverty and Economic Growth: Does Sustainable Development Goal Can be Achieved?*” ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH (2022). Studi ini menganalisis bagaimana ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi rentan terhadap guncangan eksternal di Vietnam dari 1990 hingga 2016. Hasilnya menunjukkan hubungan jangka panjang antara ketimpangan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, dengan penurunan dampak ketimpangan saat variabel seperti rasio investasi terhadap PDB dan jumlah tahun pendidikan diperhitungkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan dan kemiskinan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, terutama pada tingkat kemiskinan yang tinggi, dan menyarankan bahwa kebijakan pengurangan kemiskinan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun tidak langsung mengatasi ketimpangan pendapatan.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Suhendra, Navik Istikomah, Rah Adi Fahmi Ginanjar, Cep Jandi Anwar dengan judul “*Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia*” JOURNAL OF ASIAN FINANCE, ECONOMICS AND BUSINESS Vol 7 No 10 (2020). Penelitian ini mengkaji dampak modal

manusia dan variabel ekonomi lainnya terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Indonesia selama periode 2013-2019. Dengan menggunakan model data panel dan estimasi efek tetap, hasilnya menunjukkan bahwa modal manusia, yang diukur melalui indeks pendidikan baru, secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan modal manusia terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yang memperbaiki peluang kerja dan pendapatan. Sebaliknya, inflasi memperburuk kesenjangan pendapatan, meningkatkan jumlah orang berpendapatan rendah dan memperburuk kondisi mereka. Temuan ini menekankan pentingnya modal manusia bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, bersama dengan variabel ekonomi lainnya.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Mubinzhon Abduvaliev dan Ricardo Bustillo dengan judul "*Impact Of Remittances On Economic Growth And Poverty Reduction Amongst CIS Countries*" Post-Communist Economies Tujuan utama makalah ini adalah untuk menilai dampak pengiriman uang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara bekas Uni Soviet, dibandingkan dengan sumber modal eksternal lainnya seperti bantuan luar negeri dan investasi asing langsung. Dalam makalah ini, kami menggunakan data panel mengenai pertumbuhan ekonomi dan estimasi kemiskinan (rasio kemiskinan, kesenjangan kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan) di 10 negara bekas republik Soviet, yaitu Negara-Negara Persemakmuran Independen (CIS). Kami menemukan bahwa, rata-rata, peningkatan aliran remitansi sebesar 1% menyebabkan kenaikan sekitar 0,25% dalam PDB per kapita dan penurunan 2% dalam tingkat keparahan kemiskinan. Remitansi tampaknya memberikan pengurangan kemiskinan yang signifikan dengan cara meningkatkan pendapatan dan meratakan tingkat konsumsi.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Hugues Kouassi Kouadio dan Lewis-Landry Gakpa, dengan judul "*Do Economic Growth And Institutional Quality Reduce Poverty And Inequality In West Africa?*" Selama dua dekade terakhir, Afrika Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun tetap menghadapi ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi. Meskipun pertumbuhan ekonomi

biasanya dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan, efeknya di Afrika Barat tampaknya terbatas oleh faktor-faktor lokal. Studi ini meneliti peran institusi dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah ini. Menggunakan data dari *World Development Indicators (WDI)*, *International Country Risk Guide (ICRG)*, dan *Standardized World Income Inequality Database (SWIID)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk pengurangan kemiskinan, sementara peningkatan kualitas institusi seperti demokrasi, sistem peradilan, regulasi, pengendalian korupsi, dan stabilitas pemerintah juga berkontribusi signifikan. Untuk efektifitas pengurangan ketimpangan, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan, pengurangan korupsi, dan peningkatan kualitas birokrasi. Temuan ini mendorong pembuat kebijakan di Afrika Barat untuk memperkuat kerangka institusi mereka guna meningkatkan kesejahteraan warga.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kuncara, Didin Mukodim, dan Waseso Segoro, dengan judul "*The Effect Of Health, Education, Capital, Technology, Inflation, And Gross Of Regional Domestic Products On Poverty Level In North Maluku Province. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, TECHNOLOGY & MANAGEMENT, 2020 2(4)*" Kemiskinan adalah masalah sosial yang timbul dari berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, terutama di bagian timur, kemiskinan masih tinggi akibat ketidakmerataan dalam pendidikan, pekerjaan, infrastruktur, dan ekonomi. Penelitian ini menganalisis pengaruh tenaga kerja, modal, inflasi, dan produk domestik bruto regional terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Menggunakan data sekunder dan model regresi data panel, hasilnya menunjukkan bahwa variabel kesehatan, pendidikan, modal, teknologi, inflasi, dan PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi tersebut.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Erlando, Feri Dwi Riyanto, Someya Masakazu dengan judul "*Financial Inclusion, Economic Growth, And Poverty Alleviation: Evidence From Eastern Indonesia*" Pentingnya memahami hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi

fokus utama dalam pembangunan nasional, terutama dalam merumuskan kebijakan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, seperti yang terlihat di Indonesia Timur. Makalah ini menganalisis secara empiris kontribusi inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: *Model Kausalitas Bivariate VAR Toda-Yamamoto* dan *Panel Vector Autoregression (PVAR)* dinamis. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan sosio-ekonomi berdampak positif pada inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan, tetapi inklusi keuangan juga meningkatkan ketimpangan, yang memperluas ketimpangan pendapatan di Indonesia Timur.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta, Eny Fahrati dengan judul “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2005-2019. Menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda dan data sekunder *time series* yang diolah menggunakan SPSS-26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan, dengan Pendapatan Perkapita sebagai faktor paling dominan. Untuk mengurangi kemiskinan, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor potensial seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, dan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto.
15. Anak Agung Eriek Estrada dan I Wayan Wenagama dengan judul “*Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan.*” Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggabungkan data deret waktu (*time series*) dan data *cross-section* dari tahun 2009-2013. Data diperoleh melalui studi pustaka,

sehingga tidak memerlukan teknik sampling atau kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan panel data melalui program Eviews 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali pada periode 2009-2013.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Radiatul Fadila dan Marwan dengan judul “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2013-2018.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat pada periode 2013-2018. Menggunakan *Model Random Effect* dengan aplikasi Eviews 10, hasilnya menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyeimbangkan antara industri padat modal dan padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.
17. Penelitian yang dilakukan oleh Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari dengan judul “*Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*” Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap kemiskinan di 34 provinsi Indonesia selama periode 2011-2017, menggunakan data sekunder dari BPS. Menggunakan Metode Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model*, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, PDRB dan Tingkat Pengangguran

berpengaruh signifikan, sementara IPM tidak. Pemerintah disarankan fokus pada peningkatan pendapatan daerah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

18. Penelitian yang dilakukan oleh Reki Ardian, Yulmardi, Adi Bhakti dengan judul "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi*" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan serta pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif pada data runtun waktu dari tahun 2000-2017, hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Namun, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di wilayah ini.
19. Penelitian yang dilakukan oleh Ikke Indrawati, Sudati Nur Sarfiah, Rian Destiningsih dengan judul "*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019.*" Kemiskinan menjadi masalah utama di Kawasan Timur Indonesia, terutama di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kabupaten Deiyai mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 44,35%, diikuti oleh Kabupaten Intan Jaya sebesar 41,63% pada periode 2014-2019. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua, termasuk Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menggunakan analisis Regresi Data Panel dengan Model *Fixed Effect*. Penelitian mencakup 29 kabupaten/kota dengan data dari 2014-2019. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut bersama-sama

mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua selama periode penelitian.

20. Penelitian yang dilakukan oleh Nada Kirana Sari, Dwi Susilowati dan Zainal Arifin dengan judul “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Madura.*” Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Kabupaten di Pulau Madura memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten-kabupaten di Pulau Madura pada periode 2012-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan analisis Regresi Data Panel dengan Model *Random Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten-kabupaten di Pulau Madura selama 2012-2018. Secara simultan, ketiga variabel ini juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendidikan (dilihat dari rata-rata lama sekolah), dan IPM semuanya memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan masing-masing variabel menunjukkan koefisien dan nilai probabilitas yang signifikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui terdapat banyak sekali penelitian yang telah dilakukan khususnya pada variabel kemiskinan. Namun, sejauh dari analisis yang penulis lakukan belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas terkait *Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*, yang hal ini dapat dijadikan *novelty* atau kebaruan dalam khazanah penelitian terkait dengan empat variabel tersebut yaitu : 1) Pendapatan Per Kapita 2) Pertumbuhan Ekonomi 3) Indeks Pembangunan Manusia dan 4) Tingkat Kemiskinan. Selain itu tinjauan atau perspektif politik ekonomi syariah menjadi sisi kebaruan yang lain dalam penelitian ini.